



NOTULENSI DISKUSI DARING

MENYELAMATKAN LAYANAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DARI DAMPAK COVID-19

Hari/Tanggal : Minggu, 26 April 2020

Waktu : 15.15 – 17.30

Penyelenggara : INSTRAN (Institut Studi Transportasi)

Darmaningtyas, Moderator

- Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang menyelamatkan layanan transportasi umum. Saya tidak perlu menjelaskan latar belakangnya karena kita semua sudah tahu apa yang dialami oleh teman-teman operator kendaraan umum.
- Narasumber kita pada diskusi ini: Bapak Yustinus Prastowo, Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis; Bapak Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan; Brigadir Jenderal (Pol) Dr. Chrysnanda Dwilaksana, Direktur Kemananan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri; H. Shafruhan Sinungan, Ketua DPD Organda DKI Jakarta; I Nyoman Sudiarta, Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali; Angga Vircansa Chairul, Direktur PO NPM; dan Vicky Hosea, Direktur PO Putra Jaya.
- Diskusi ini berbeda dengan diskusi seperti biasanya yang diawali paparan oleh para pengambil kebijakan. Kali ini saya memberikan kesempatan kepada para narasumber dari operator untuk menyampaikan keluhannya yang kemudian akan ditanggapi oleh Pak Yustinus, Pak Yani, dan Pak Chrysnanda.

Suara Para Operator

1. Nanda, DPC Organda Kota Surabaya

- Terkait dengan permasalahan transportasi di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, saat ini sudah muncul Peraturan Gubernur yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya yang meliputi Gresik, Sidoarjo dan Surabaya mulai dari tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020. Peraturan Gubernur tersebut menyatakan bahwa ada kemungkinan PSBB akan diperpanjang yang tentunya melalui wewenang Pemerintah Provinsi.
- Di dalam Peraturan Gubernur ini tidak memberikan kepastian kapan akan dilakukan normalisasi operasional transportasi umum. Jika mengacu pada Peraturan Gubernur, bisa saja akan dilakukan evaluasi operasional hingga dua sampai tiga bulan ke depan. Namun, jika mengacu kepada



Peraturan Kementerian Perhubungan No. 25 tahun 2020, larangan beroperasi dilakukan dari 24 April 2020 sampai 31 Mei 2020. Apakah evaluasi itu mencakup batasan maksimal 31 Mei 2020? Apakah setelah 31 Mei 2020 angkutan umum sudah bisa kembali beroperasi? Hal ini sangat penting bagi anggota kami karena terkait hak hidup ekonomi.

- Apa definisi dari kata ‘menyelamatkan’ dalam judul diskusi ini? Kami dari DPC Organda memaknainya sebagai tindakan untuk meminimalisir dampak terburuk kondisi saat ini, baik dari Covid-19 maupun kebijakan yang dibuat untuk menanggulangi Covid-19 ini. Kita dihadapkan pada kebijakan yang tidak memberikan kejelasan kapan diperbolehkan beroperasi dan bagaimana hak ekonomi pelaku usaha maupun selama tidak beroperasi.
- DPC Organda Kota Surabaya berharap Pemerintah memperhatikan dan melindungi pelaku usaha transportasi umum melalui insentif dengan teknis yang jelas. Pemerintah Pusat juga diharapkan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan para pelaku usaha dalam menghadapi wabah ini.

2. I Nyoman Sudiarta, Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali

- Pawiba adalah asosiasi Pengusaha Angkutan Pariwisata Bali.
- Terkait dengan wabah Covid-19, bus pariwisata di Bali sudah mengalami penurunan sebesar 80% sejak bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 sudah 100% tidak beroperasi sejak keluar Peraturan Menteri No. 25 tahun 2020. Sebanyak 1.200 unit armada, 2.000 crew, dan 300-500 orang pegawai yang sudah dirumahkan.
- Kami berharap Pemerintah memberi kebijaksanaan terhadap kelangsungan bisnis transportasi. Kami ingin mengajukan relaksasi stimulus kepada Pemerintah seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui media. Kami di Denpasar belum mendapatkan stimulus tersebut.
- Kami beserta teman-teman PO pariwisata ingin mendapatkan stimulus. Pertama, penundaan pembayaran angsuran yang mungkin ditunda selama enam bulan dan kemudian bisa dievaluasi. Kedua, terkait dengan pembayaran pajak, penghapusan Pasal No. 21 dan No. 25. Selain itu, pemberian relaksasi pembayaran BPJS karyawan kami yang sudah dirumahkan. Ketiga, relaksasi terkait dengan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), KIR, dan Jasa Raharja.
- Kami sudah menerima BLT, tinggal menunggu pencairan serta bantuan sembako dari Pemerintah untuk karyawan, tetapi belum ada bantuan keringanan untuk pelaku usaha.



3. Angga Vircansa Chairul, Direktur PO NPM – Sumatera Barat

- Dua hari lalu merupakan hari terakhir kami berangkat ke Jakarta walaupun dua bulan lalu kami sudah menghentikan armada. Pada tanggal 30 Maret 2020, di Sumatera Barat sudah ada surat yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Barat untuk menghentikan AKAP, AJAP, dan AJDP. Kami sudah sempat berhenti beroperasi, kemudian beroperasi lagi, tapi kemudian berhenti lagi.
- Secara pribadi, saya mengerti bahwa perubahan itu konstan dan Pemerintah sedang berusaha untuk melewati wabah Covid-19 ini.
- Saya menggaris bawahi Peraturan OJK No. 11/2020 yang telah diterbitkan oleh OJK bahwa akan ada kelonggaran mengangsur untuk pinjaman di bawah Rp. 10 miliar yang akan diberikan untuk meringankan beban kami. Namun itu tidak dapat kami nikmati karena satu unit bus kami seharga lebih dari 1,5 miliar. Jadi, jika kami membeli 10 unit bus baru, berarti kami memiliki pinjaman 15 miliar. Jika DP-nya 20% itu berarti tiga miliar. Pinjaman kami ke bank atau *leasing* 12 miliar. Berdasarkan keterangan dari bank dan *leasing*, kami tidak *eligible* untuk mendapatkan keringanan itu.
- Saya memohon penjelasan dari Kementerian Keuangan terkait FAQ dari OJK bahwa seluruh bisnis yang terdampak secara langsung ataupun tidak langsung dari Covid-19 ini boleh mengajukan permohonan relaksasi terlepas itu di bawah 10 miliar atau di atas 10 miliar. Saya sudah mengajukan itu sejak 28 Maret 2020, namun belum ada kejelasan.
- Di PO NPM terdapat 133 orang pengemudi dan 70 orang kru, yang artinya ada 203 KK yang terdampak dari Covid-19. Kepolisian Resort sudah memberikan BLT kepada beberapa daerah namun belum cair dananya. Semua pengemudi sudah memiliki kartu Brizzi, semoga dana segera cair. Selain itu, ada beberapa teman kami yang tidak mendapatkan BLT karena kehabisan kuota.
- Kami berharap mendapatkan relaksasi BPJS, pajak, perbankan, non perbankan dan sebagainya selama enam bulan atau selama wabah Covid-19 ini berlangsung.
- Kami mengharapkan Pemerintah segera mengeluarkan SOP untuk AKAP, AJAP, dan AJDP selama wabah Covid-19 berlangsung.
- Selain bantuan dari Polres, pengemudi juga menerima bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun tidak spesifik. Tidak spesifik maksudnya di sini adalah tidak spesifik sebagai awak angkutan, namun karena sebagai warga masyarakat masuk ke dalam daftar penerima bantuan. Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk Prakerja, tetapi yang menjadi kendala adalah pengemudi belum melek teknologi. Selain itu, ada BLT dari Dinas Sosial, yang menjadi kendala adalah administrasi yang sulit dan kuota yang terbatas.



4. Vicky Hosea, PO Putra Jaya – Sulawesi

- Kami di Makassar sudah mengalami penurunan operasi sebanyak 50% mulai pertengahan Maret 2020 hingga akhir Maret 2020. Pada awal April 2020 sudah ada 80% PO yang tidak beroperasi. Sejak ada Peraturan Kementerian Perhubungan No. 25 tahun 2020, tersisa 10% PO yang beroperasi di Sulawesi hingga saat ini dengan total operator yang ada di Sulawesi sekitar 30 PO dan 300 unit armada yang aktif, ada sekitar 700 pramudi dan 700 crew yang terdampak wabah Covid-19 di Sulawesi.
- Kami mendukung kebijakan Pemerintah terkait PSBB yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Perhubungan No. 25 tahun 2020 untuk menanggulangi wabah Covid-19. Dengan adanya Peraturan Kementerian Perhubungan No. 25 tahun 2020 ini di Makassar sudah tidak melayani angkutan penumpang dan PO yang tidak beroperasi semakin bertambah karena mempertimbangkan biaya operasional yang sulit dipenuhi jika tidak ada penumpang.
- Sejak dua minggu lalu kami sudah melakukan pendataan crew awak angkutan untuk diberikan BLT namun belum ada *feedback* dari Kepolisian Resort apakah dana akan dicairkan atau tidak. Awak angkutan kami resah kapan bisa kembali bekerja karena dorongan dari kebutuhan hidup.
- Terkait dengan stimulus yang dicantumkan dalam Peraturan OJK, kami selaku pelaku usaha angkutan umum masih mengajukan stimulus untuk diberikan keringanan ke *leasing*. Untuk penghapusan atau pengurangan denda serta penghapusan atau pengurangan denda belum ada skema dari perbankan, hanya ada penangguhan bunga ke dalam hutang pokok kredit yang nantinya akan dihitung pada saat wabah Covid-19 ini selesai. OJK yang mengeluarkan POJK sebaiknya tetap mengawasi perbankan dan non perbankan yang melakukan restrukturisasi stimulus terkait adanya wabah Covid-19.

5. H. Shafruhan Sinungan, Ketua DPD Organda DKI Jakarta

- Awak angkutan umum DKI Jakarta yang terdampak dari wabah Covid-19 lebih dari 150.000 orang, 62.000 awak angkutan orang sudah tidak beroperasi. Dampak wabah Covid-19 sudah dirasakan penurunannya oleh angkutan orang sejak bulan Januari 2020 dan pada bulan Februari 2020 sudah mencapai 100% penurunannya oleh angkutan pariwisata.
- DPP sudah mengajukan relaksasi kepada Pemerintah terkait relaksasi dan restrukturisasi kredit terhadap perbankan dan lembaga kredit lainnya. Hal ini bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah dan cepat terutama jika *leasing* yang modalnya dari luar negeri karena membutuhkan proses yang memakan waktu. Ada operator yang memang menggunakan jasa keuangan luar negeri.



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

- Kita juga memikirkan bagaimana pelaku usaha ini bangkit setelah dua bulan tidak beroperasi atau setelah Lebaran karena sektor transportasi merupakan tulang punggung yang dapat menyerap tenaga kerja baik yang formal maupun yang non formal.

6. Asmat Lie, Direktur PT. Royal Wisata Nusantara

- Sejak pertengahan bulan Maret 2020, kami sudah berhenti beroperasi, baik bus *shuttle* maupun bus pariwisata sambil menunggu wabah Covid-19 ini selesai dan kami harus menerima kondisi seperti ini.

7. Kurnia Lesani Adnan, Ketua Bidang Angkut Orang DPP Organda

- Selaku pelaku usaha Bus AKAP murni, sejak tanggal 24 Maret 2020 kami berhenti beroperasi. Kami memiliki trayek jarak jauh dari Riau ke Jawa Timur. Kami sudah mendapat himbuan untuk tidak berangkat di Terminal Pekanbaru dan Jambi. Penumpang kami harus diturunkan di sana. Ini yang tidak terpikirkan kita semua. Tetapi tadi pagi kami melihat di Merak ada PO jurusan Pati dan PO lain yang masih berjalan walaupun harus melalui jalan tikus. Kejadian ini biasanya terjadi pada malam hari di perbatasan-perbatasan. Kami memohon dari pihak Korlantas agar tegas dalam menyikapi hal ini terkait dengan penyebaran wabah Covid-19, bukan dari sektor bisnis semata. Kami dari operator swasta sangat menyayangkan bahwa operator Badan Usaha Milik Negara masih bisa beroperasi, ini artinya pengawasan di lapangan dan penegakan terhadap Peraturan Kementerian Perhubungan No. 25 tahun 2020 masih kurang.
- Sebagai bagian dari bangsa ini, kami akan menaati peraturan yang ada. Namun, kami memohon Pemerintah memberikan para awak angkutan dan pelaku usaha angkutan umum jaminan ketenangan untuk mempertahankan hidup sampai wabah Covid-19 ini selesai dan bangkit kembali. Ini tugas kita bersama.
- Diharapkan pemerintah lebih tegas dalam mengeluarkan kebijakan dan memberikan prioritas kepada transportasi angkutan umum.

8. Hantoro, ST Hans – DPD Organda DI Yogyakarta

- Kami di Yogyakarta membawahi sekitar 60 perusahaan bus pariwisata dengan jumlah kendaraan sekitar 817 armada, 21 perusahaan taksi dengan jumlah kendaraan 1.000 armada, 15 perusahaan angkutan AKAP dengan jumlah kendaraan 150 armada, dengan total keseluruhan sekitar 3.600 awak angkutan umum. Operator yang bergerak di sektor pariwisata sudah berhenti beroperasi sejak bulan Maret 2020, sedangkan untuk sektor AKAP sudah berkoordinasi pada tanggal 20 April



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

2020. Wabah Covid-19 ini juga berimbas bagi taksi yang berada di kota. Banyak awak angkutan umum yang sudah berhenti beroperasi sejak satu bulan lalu.

- Stimulus yang berupa pelatihan dan BLT sebesar Rp. 600.000,- hanya kami terima sebesar 20% dari kuota, padahal kami sudah mengumpulkan semua data dan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas. Ternyata pelaksanaan dilaksanakan oleh Polres. Dari data yang sudah dikirimkan ke Direktorat Lalu Lintas, tidak diserahkan kepada Polres dan akhirnya Polres mencari data sendiri. Maka dari itu, kami hanya mendapatkan 20% dari kuota BLT, tidak tahu bagaimana masih 80% yang tidak mendapatkan BLT. Adapula perusahaan yang bersubsidi dari Pemerintah malah mendapatkan stimulus tersebut dan bisa dikatakan salah sasaran. Kami memohon perhatiannya kepada Korps Lalu Lintas terkait stimulus ini.
- Kami sudah melakukan empat langkah dalam melawan Covid-19 ini. Pertama, kami sudah mengajukan relaksasi ke OJK dan 75% anggota kami sudah mendapatkan persetujuan relaksasi. Kedua, kami sedang mencari stimulus bagi awak kendaraan melalui BLT dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga bingkisan dari Kementerian Pariwisata. Ketiga, terkait dengan perpajakan, kami akan menghadapi PPh Pasal 25 dan Pasal 21. Kepada Pak Yustinus, apakah kami perlu melakukan permohonan penghapusan ataupun pemotongan dari PPh tersebut? Mohon perhatiannya bagi angkutan umum terkait penghapusan dan pemotongan PPh ini. Dari yang kami lihat, pemotongan PPh itu ditujukan kepada perusahaan manufaktur, padahal hingga saat ini perusahaan manufaktur masih banyak yang beroperasi. Keempat, bagaimana jika virus korona ini sudah pergi? Kami sudah menginformasikan kepada operator untuk mengubah segi pemasaran dengan menciptakan kendaraan yang sehat dan bersih.
- Saat ini kami sedang menangis karena harus berhenti beroperasi. Jika hingga bulan Juni 2020 tetap tidak bisa beroperasi maka kami akan hancur. Tidak ada perusahaan transportasi angkutan umum yang tidak menggunakan jasa keuangan. Maka dari itu, kita perlu membuka logika dan wawasan kita sampai kapan wabah ini akan berlangsung dan bagaimana cara menghadapinya, bukan hanya ketakutan akan bahaya Covid-19 saja.

Darmaningtyas, Moderator

1. Diskusi ini selain diikuti oleh para operator dari berbagai daerah, juga diikuti oleh 14 media, yaitu Bisnisnew.com, Kompas, Antara TV, I News.id, Katadata, Harian Republika, Investor Daily, Berita Satu, JPNN.com, Alinea.id, Kumparan, Detik.com, CNN Indoensia TV, Liputan 6, dan Kantor Berita Antara. Juga beberapa akademisi antara lain Ir. Ellen Tangkudung dari Universitas Indonesia, Dr. Sony Laksono Wibisono dari Institut Teknologi Bandung, Ir. Djoko Setijowanro dari Universitas Soegijapranata Semarang, Ir. Lilik Wajid dari Transco Yogyakarta, Dr. Ilham Malik dari Universitas Bandar Lampung, dan Profesor Eko Ganis Sukoharsono, Akademisi Universitas Brawijaya.



Tanggapan Narasumber dari Pemerintahan

1. Yustinus Prastowo, Staff Khusus Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi Strategis

- Terima kasih sudah dilibatkan dalam diskusi untuk mendengarkan apa yang sedang Bapak/Ibu hadapi di lapangan dan ini masukan yang luar biasa. Kami berempati dan sangat berbela rasa dengan apa yang kita alami. Kami sangat memahami masalah yang harus dihadapi di dalam dunia usaha sangat tidak mudah, termasuk yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat kita. Kami mewakili Pemerintah juga bekerja keras memikirkan dan merumuskan langkah apa yang cepat dan tepat. Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar lembaga sangat kompleks dan tidak mudah tetapi kami berharap ada sinergi yang lebih baik.
- Terkait dengan kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah untuk menangani Covid-19, terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 yang kami nilai sebagai langkah yang cepat dan tepat karena jika mengandalkan langkah-langkah biasa akan semakin tertinggal. Perppu No. 1 tahun 2020 ini memberikan ruang kepada Pemerintah untuk bergerak lebih leluasa. Defisit APBN tidak diberikan batas atas. Dulu diberi batas 3% dari PDB, sekarang dibuka agar pembiayaan penanganan Covid-19 ini lebih terakomodir dan terpenuhi secara dinamis. Kita tidak tahu wabah Covid-19 ini akan berlangsung sampai kapan dan seberapa besar dampaknya.
- Ekonomi itu bertumpu pada mobilitas dan tidak akan berjalan jika tidak ada mobilitas. Bapak/Ibu merupakan pilar mobilitas karena berada di sektor transportasi.
- Setelah Perppu No. 1 tahun 2020 terbit, muncul Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020 yang melakukan *refocussing* anggaran, penghematan, efisiensi, realokasi, termasuk mengeluarkan *global bonds* dan *pandemic bonds* untuk pembiayaan ini.
- Pemerintah fokus pada tiga hal yang dikerjakan secara sekaligus. Pertama, kesehatan terkait dengan penanganan Covid-19, mulai dari penyediaan APD, alat kesehatan, tenaga kesehatan, rumah sakit, dan industri kesehatan juga didukung. Kedua, jaringan pengaman sosial. Delapan program telah diluncurkan yang akan menjangkau 45 juta kepala keluarga dengan berbagai variasi. Ketiga, stimulus ekonomi.
- Saya terharu karena pada sore hari ini, para pelaku usaha transportasi yang sangat terdampak dari wabah Covid-19 bisa memahami situasi, hanya menyampaikan keluhan yang masih terbilang sangat wajar, dan Pemerintah wajib menolong karena ini fakta yang dihadapi.
- Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sedang dan akan dikerjakan oleh Pemerintah. Pertama, insentif pajak. Stimulus pertama praktis tidak bisa dilaksanakan karena pariwisata sudah berhenti. Kedua, stimulus untuk 11 sektor non faktur. Minggu depan akan terbit Peraturan Menteri (Keuangan) yang terbaru, di mana dalam Peraturan Pemerintah Pasal 21, Pasal 22, dan



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

Pasal 25, sektor transportasi masuk ke dalam 18 sektor yang paling terdampak dan akan diberi insentif stimulus ini. Terkait dengan angsuran pajak, bagi perusahaan yang berbentuk badan bisa mengajukan pajak lebih rendah mulai bulan ini ketika menyampaikan SPT baik SPT sementara, boleh menggunakan tarif baru 22%. Ditambah lagi, jika tiga bulan pertama proyeksi usahanya menurun boleh mengajukan pengurangan angsuran lebih besar lagi dengan dilampiri proyeksi hingga satu tahun ke depan. Kiranya stimulus ini bisa dimanfaatkan. Mohon sampaikan ke kami jika ada kendala di lapangan, dipersulit, dan perbedaan penafsiran agar kami bisa memberikan pedoman yang lebih jelas kepada teman-teman di lapangan. Kedua, pemerintah juga sudah mengalokasikan stimulus di bidang kesehatan tetapi tidak terlalu relevan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak/Ibu.

- Pemerintah sedang menyiapkan beberapa skema. Yang **pertama** adalah relaksasi kredit. OJK sudah mengeluarkan POJK No. 11 tahun 2020 yang sudah diterapkan walau masih ada masalah di lapangan. Tentunya ini menjadi catatan dan kami akan terus berkoordinasi dengan OJK. Pemerintah sedang menyiapkan skema bagi kreditur menengah ke atas yang tergolong Kol-1 dan Kol-2 untuk diperbantukan industri keuangan non perbankan dalam pembiayaan yang akan *discover* di sini agar mendapatkan relaksasi kredit berupa penundaan angsuran pokok dan besaran bunga sesuai dengan kebijakan dari lembaga keuangan terkait. Pemerintah mendukung LPS supaya bisa menjangkau lebih besar lagi, serta mendukung Askrindo dan Jamkrindo sehingga perbankan bisa melakukan relaksasi. **Kedua**, kami mendukung perbankan dan non perbankan agar lebih berani dalam memberikan kredit kepada usaha kecil, menengah, dan besar. Kami bersama Bank Indonesia dan OJK sedang merumuskan skema yang lunak agar pelaku usaha bisa tetap bertahan hidup. Semoga skema ini bisa segera diselesaikan.
- BLT merupakan kewenangan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah, tetapi Kementerian Keuangan membantu merumuskan skema dan menyediakan alokasi anggarannya. Kami di sini memastikan agar bantuan ini tidak salah sasaran dan membantu jika ada kesulitan di lapangan.
- Kami memiliki Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10 juta kepala keluarga dengan total alokasi sekitar Rp. 37 triliun. Variasinya sekitar Rp. 250.000,- per bulan untuk keluarga yang sudah terdaftar. Kepala keluarga yang tidak termasuk dalam PKH bisa masuk ke dalam Kartu Sembako, bantuan pangan non tunai dalam bentuk sembako yang menjangkau 20 juta kepala keluarga penerima manfaat dengan alokasi sekitar Rp. 43 triliun. Jika tidak masuk ke dalam keduanya, masih ada Bantuan Sosial Tunai untuk 9 juta keluarga di luar Jabodetabek seperti pramudi, tukang ojek, pedangang kecil, dan sebagainya. Ada juga bantuan sembako untuk Jabodetabek untuk dua juta kepala keluarga sebesar Rp. 3,4 triliun. Ada pula BLT Desa dari dana realokasi dana desa sekitar Rp. 22 triliun untuk 20 juta penerima yang tidak bekerja, korban PHK, serta termasuk yang pulang kampung. Bagi yang tidak masuk ke semuanya, jika ada anggota keluarga yang lulusan SMA dan yang tidak bisa bekerja karena PHK, Program Kartu Prakerja bisa menjadi alternatif yang dialokasikan sebesar Rp. 20 triliun untuk 56 juta peserta.



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

- Di luar itu, masih ada realokasi APBD. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan efisiensi untuk paket pertama hingga mencapai 405 triliun jika ditambah dengan penambahan realokasi dasana desa. Secara garis besar, alokasi untuk stimulus dunia usaha ini Rp. 150 triliun, Rp. 110 triliun untuk bansos, Rp. 70 triliun untuk dukungan industri, dan Rp. 75 triliun untuk kesehatan. Jika nanti masih kurang, akan ada paket berikutnya.
- Kami butuh dukungan dari Bapak/Ibu agar ini berjalan lancar, efektif, dan efisien di lapangan serta tidak salah sasaran. Kami akan menyampaikan dan mengeksekusi masukan dari hasil diskusi ini agar kita semua bisa bertahan hidup di masa seperti ini. Semoga ke depannya kita bisa saling bersinergi, bangkit, dan tumbuh lebih baik. Banyak yang bisa kita pelajari dari kejadian ini seperti kita dipaksa untuk melek teknologi dan bisa bekerja untuk melayani rakyat.
- Untuk pelaku usaha dengan pinjaman di atas Rp. 10 miliar, skemanya bukan pinjaman dari POJK tetapi pemerintah memberikan dukungan dengan cara *cosharing* dan *resharing* di perbankan terutama bagi yang Kol-1 dan Kol-2 untuk mendapatkan penjadwalan kredit, dan ini sedang dirumuskan skemanya. Kami mencari jalan terbaik agar tidak salah sasaran. Kami sedang koordinasi dengan perbankan karena merekalah yang memiliki datanya. Untuk yang di atas Rp. 10 miliar akan ada skema yang berbeda. Mohon agar bersabar karena ini masih dikoordinasikan antara Kementerian Keuangan, OJK, dan perbankan.

2. Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan

- Apa yang disampaikan oleh Pak Yustinus mengenai skema dan relaksasi bermula dari usulan kami bersama Pak Ateng dan Pak Sani. Mari kita sama-sama berusaha agar setelah wabah Covid-19 ini kita lalui, kita bisa bangkit kembali. Semua usulan dan data yang disampaikan ke Kementerian Perekonomian tetap melalui Organda.
- Berdasarkan data Organda, terdapat 346 perusahaan AKAP, 56 perusahaan AJAP, 1.112 perusahaan pariwisata, dan masih banyak perusahaan yang tidak terdaftar. Kami mengusahakan agar perusahaan tersebut mendapatkan relaksasi. Selain itu, kami juga berjuang untuk para pramudi, tidak hanya yang berbasis daring saja. Kami merasakan sekali apa yang dirasakan teman-teman terkait dampak dari himbuan yang berakhir dengan pelarangan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 karena kami juga berkecimpung di sana.
- Oleh karena itu, kami memohon peraturan terkait dengan stimulus ini agar disegerakan. Terima kasih kepada Pak Yustinus atas penjelasannya sehingga kami mengetahui bahwa Pemerintah tidak tinggal diam. Tugas kami adalah menyampaikan informasi yang valid dari Pemerintah kepada teman-teman operator. Terima kasih kepada Pak Chrysnanda dari Kepolisian yang telah memberikan bantuan untuk para awak angkutan umum baik di Jabodetabek maupun di daerah.

3. Brigadir Jenderal (Pol) Dr. Chrysnanda Dwilaksana, Direktur Kemananan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

- Saya memahami beratnya tekanan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dan awak angkutan umum terlebih karena belum adanya kepastian.
- Polisi berusaha membangun solidaritas sosial sebagai bentuk dari kepekaan, kepedulian, empati dan bela rasa. Bukan tentang benar dan salah, tetapi apa yang bisa kita berikan, mari lakukan. Bukan sekedar memberikan BLT, tetapi ini merupakan suatu kepedulian dari program keselamatan. Artinya, ada pesan moral yang ingin disampaikan, bahwa secara moral kita tetap harus memberikan semangat, harapan, dan pesan-pesan keselamatan. Meskipun dikatakan bahwa datanya tidak sesuai dan berubah, namun ini merupakan bentuk kepedulian kami. Dananya memang tidak berasal dari Kepolisian, tetapi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ini adalah operasi kemanusiaan Kepolisian terhadap yang terdampak wabah Covid-19 ini terutama pramudi sebagai bagian terpenting di dalam pencegahan penyebaran Covid 19.
- Pak Yustinus mengatakan bahwa *supply and demand* ini terputus oleh pergerakan yang terhenti dan entah sampai kapan pergerakan itu terhenti kita tidak tahu. Kita tidak bisa hanya membahas permasalahan wabah ini saja tetapi juga perlu membahas bagaimana solusinya yang beradab.
- Dalam konteks pelatihan ini, prosesnya kami lakukan secara bertahap pada level tingkat Kota/Kabupaten Polres. Kami berterima kasih atas masukannya terkait data yang tidak cocok dan kami belajar bahwa sekarang ini saatnya berubah. Saya tidak menganggap ini keluhan tetapi sebagai harapan. Saya menghimbau agar kita tidak boleh hanyut di dalam pandemi Covid-19 ini.
- Jika dikatakan bahwa Kepolisian tidak tegas, sebetulnya kami sudah melakukan semaksimal mungkin. Kami sudah melakukan penyekatan, pengecekan, dan juga pemeriksaan di berbagai daerah terutama di jalan tol. Banyak daerah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pembatasan. Memang masih ada kemungkinan jika ada yang kucing-kucingan terutama di malam hari.

DISKUSI

1. SN. Milatia Moemin, Direktur Utama Perum DAMRI (BUMN)

- Armada kami yang beroperasi dari bulan Maret 2020 sampai bulan April 2020 hanya 10% dari keseluruhan. Sejak ada penutupan di Jabodetabek, tujuan dan dari Bandara Soekarno Hatta terpaksa harus kami hentikan operasionalnya. Saat ini bus kami beroperasi hanya untuk antar jemput tenaga medis dari beberapa poin ke rumah sakit rujukan guna membantu mereka dalam *social distancing* dan *physical distancing* agar mendapatkan akses yang lebih baik dan sampai ke rumah sakit tepat waktu. Selain itu, kami juga melayani beberapa perbankan yang harus bekerja.
- Jika dilihat dari segi komersial, memang kami terdampak parah. Kami sangat mendukung program Pemerintah walaupun tidak mudah bagi kita.
- Saya menghimbau agar kita semua tidak mudik. Saya memiliki *tagline* “no mudik, no cry”.



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

- Ironisnya, masih ada *e-commerce* yang menjual jasa angkutan umum ilegal dan ini sangat sulit dikontrol. Kendaraan plat hitam masih mereka sewakan. Jika seluruh bangsa berjuang untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, seharusnya mereka juga menjadi bagian dari pergerakan ini. Saya sangat yakin para operator tidak akan melayani selama peraturan PSBB ini berlaku. Hal seperti ini yang harus kita cermati bersama.
- Pelayanan Damri dari Sabang sampai Merauke. Pramudi Damri sendiri memang sudah berada di daerah masing-masing, jadi tidak ada yang dirumahkan.

2. Ika Kuswardhani, Manajer PT. Pahala Kencana

- Kantor Pusat kami berada di Kudus, walaupun pelayanan terbesar kami ada di Jakarta, Bandung, dan Malang. Terkait dengan BLT yang dikeluarkan oleh Polres, awak angkutan yang mendapatkan hanya yang berada di Kudus. Sedangkan yang ada di Jakarta, Bandung, dan Malang tidak dapat menerima karena hanya cabang dari Kudus.
- Terkait dengan pelarangan, bus kami sementara memang sedang berhenti beroperasi dan dititipkan di rumah makan di Lampung menghindari masalah pada saat menyeberang. Sebaiknya memang ada keputusan kapan bus AKAP bisa beroperasi kembali agar kami tidak resah akan kondisi bus yang kami titipkan bukan di pool. Dengan adanya keputusan tersebut, setidaknya sangat membantu kami untuk mengetahui langkah apa yang harus kami ambil terhadap aset yang kami lepas di lapangan.
- Kami sangat mengetahui bahwa ketegasan Kepolisian di DKI Jakarta sudah sangat baik. Lain halnya dengan yang berada di Bali. Menurut mereka, jika tujuannya bukan daerah PSBB, kendaraan tersebut masih bisa beroperasi. Hal seperti ini sangat merepotkan kami yang memiliki bus tujuan Jakarta karena kami memang memiliki satu rute, bus tersebut dihentikan dan diminta untuk kembali. Kami tidak mungkin membiarkan penumpang kami turun dan terlantar., otomatis kami hantarkan kembali menggunakan bus kami. Saya berharap di ASDP lebih diperketat, tidak hanya pemeriksaan berdasarkan KTP. Kemarin ada penumpang kami yang memiliki KTP Tegal sebagai salah satu kota PSBB, jadi kami arahkan untuk kembali ke Denpasar. Padahal bus kami tidak hanya menuju ke daerah PSBB tersebut tetapi juga ke daerah lain. Kami sudah mematuhi peraturan yang berlaku, ada kemungkinan bus lain tidak mematuhi peraturan tetapi nyatanya mereka masih bisa berlanjut. Kami mohon ketegasan sehingga jangan sampai ada penumpang yang tidak bisa balik. Lalu bagaimana dengan nasib mereka yang tidak bisa kembali ke daerahnya? Sedangkan mungkin mereka juga sudah tidak bisa bekerja di Denpasar.
- Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kami bekerjasama dengan beberapa rumah makan di tengah perlintasan yang memiliki karyawan yang cukup banyak. Berhubung dengan bus kami yang berhenti beroperasi, kami menjadi tidak yakin untuk tetap bekerjasama dengan mereka. Selain itu kami juga bekerjasama dengan para agen. Saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena pada



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

suatu saat nanti kami juga membutuhkan jasa mereka. Lalu bagaimana nasib karyawan SPBU dan *rest area* yang terdampak karena sepi nya lalu lintas? Apakah nanti harga bahan bakar akan turun setelah wabah ini selesai? Hal ini dikarenakan kondisi kami yang harus bangkit lagi dengan biaya operasional yang minim. Apakah sudah dipikirkan skema untuk PO yang akan kembali beroperasi nanti? Kita harus tahu sampai mana batasan permasalahan ini.

- Terkait dengan tidak beroperasinya pesawat, kami PO yang memiliki ijin jasa titipan berharap bisa mengkaryakan bus kami untuk melayani pengiriman barang. Kalau kami tidak difasilitasi untuk melakukan hal itu, kami benar-benar mati. Untuk saat ini, bisa dikatakan bus lebih cepat dalam pengiriman barang dibandingkan dengan pesawat karena sudah banyak tol. Semoga pihak terkait bisa memberikan jalan kepada kami agar ini menjadi opsi sebagai pengganti supaya kami bisa tetap bergerak dan ada pemasukan. Biasanya PO memiliki ijin jasa pengiriman barang, barangnya masuk di bagasi. Saat ini kami belum menjalankan, tetapi kami berharap agar kami tidak dicurigai walau tidak menutup kemungkinan ada PO lain yang masih nakal.

Darmaningtyas, Moderator

- Ini tugas untuk Pak Ahmad Yani dan Brigjen Chrysnanda agar bisa mempertimbangkan hal ini dan segera dibuat regulasinya. Saya kira ini ide yang sangat cerdas untuk menyelamatkan angkutan umum dengan memfungsikan bus untuk angkutan barang.

SN. Milatia Moemin, Direktur Utama Perum DAMRI (BUMN)

- Saya sepakat dengan Ibu Ika. Kami juga berencana mengangkut alat kesehatan menggunakan bus terutama ke daerah timur Indonesia yang memang sulit menjangkau ke titik aktivitas masyarakat.

Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan

- Semoga kebijakan bus mengangkut barang bisa dikeluarkan oleh Pemerintah setelah kita bicarakan kembali dengan teman-teman dari Organda. Perlu diingat bahwa saat ini sudah ada angkutan pengangkut barang lainnya dan jangan sampai mereka terganggu. Semoga setelah kita bicarakan nanti bisa ditemukan titik tengahnya. Saya kira ini adalah hal yang krusial di lapangan terkait dengan penegakan di pihak Kepolisian.

Brigadir Jenderal (Pol) Dr. Chrysnanda Dwilaksana, Direktur Kemananan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri

- Perlu ada suatu pemikiran bersama karena ini suatu bentuk diskresi, jadi petugas di lapangan tidak ragu dalam mengambil keputusan sehingga perlu ada keputusan yang jelas.

Tanggapan Akademisi



2. Sony Sulaksono, Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung

- Isu transportasi merupakan hal yang sangat perlu kita perhatikan karena jika kita belajar dari negara lain, transportasi merupakan salah satu media yang paling signifikan dalam penyebaran virus korona. Transportasi di negara lain dikelola oleh Pemerintah, sehingga ketika sistem transportasi ditutup tidak banyak gejolak. Sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana banyak transportasi yang dikelola oleh perusahaan swasta. Jika transportasi benar-benar ditutup, maka pelaku usaha di sektor transportasi harus benar-benar dibantu dan diperhatikan.
- Kita harus memiliki *worst scenario* sampai dua atau tiga bulan ke depan dan ini bukan merupakan hal yang mudah untuk bertahan hidup bagi pelaku usaha dan awak angkutan umum jika tidak beroperasi.
- Selain memperhatikan AKAP, Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan nasib dari angkutan perkotaan yang tidak luput dari dampak wabah ini.

3. Djoko Setijowanro, Akademisi Universitas Soegijapranata, Semarang

Pemda bisa membantu memberikan bantuan sosial ke pengemudi dan asisten pengemudi angkutan umum, seperti Bus AKDP, angkot, taksi, bus pariwisata, travel yang ijinnya di daerah... Diutamakan angkutan umum yang sudah berbadan hukum. Pusat sudah berikan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan melalui Kepolisian.

4. Ellen Tangkudung, Akademisi Universitas Indonesia

- Di sektor transportasi, semua terkena dampak dari pandemi Covid-19, baik dari penumpang, awak angkutan umum, pengusaha, dan pemerintah. Dampak yang paling utama dari Covid-19 ini adalah ketidakpastian kapan wabah ini berakhir. Persoalan utama sebenarnya adalah kesehatan, bukan di transportasi yang merupakan efek ketidakpastian dari kesehatan.
- Pelajaran yang bisa diambil dari pandemi ini adalah masalah pendataan. Sudah seharusnya Pemerintah memiliki sistem pendataan yang baik sehingga ke depannya, permasalahan mengenai pendanaan dan bantuan BLT seperti yang sebelumnya disampaikan tidak akan terjadi lagi. E-KTP kita belum bisa menghasilkan data yang dapat membantu kita dalam menangani masalah sistem pendataan ini. Semuanya harus dilakukan dengan koordinasi dan dengan sangat cermat.
- Saya sangat setuju dan berharap agar kebijakan terkait dengan inovasi dan keinginan mengusahakan agar *cashflow* tetap berjalan dengan cara mengantarkan titipan barang seperti yang Ibu Ika sampaikan tidak terlalu lama dirancang. Inovasi kegiatan ini hanya untuk sementara, tidak untuk selamanya yang juga bisa membantu pekerja di *rest area* dan rumah makan di perlintasan yang biasa dilalui.



5. Profesor Eko Ganis Sukoharsono, Akademisi Universitas Brawijaya

Saat ini Indonesia masih belum berada di pertengahan dari masa pandemi Covid-19. Saya sebetulnya ingin mengetahui seberapa besar kontribusi dari para operator dalam memerangi wabah ini, karena yang kita dengarkan tadi adalah keluhan-keluhan saja yang dihadapi oleh operator. Saya berharap agar para operator memberikan data awak angkutan yang terpapar, menarik semua bus agar tidak beroperasi di terminal bayangan, mencari alternatif jalan tikus, dan pastikan awak angkutan mereka berada di rumah. Hal seperti itu lebih utama daripada berpikir tentang stimulus, relaksasi, dan sebagainya serta melakukan upaya penanggulangan untuk kelanjutannya. Ini adalah kontribusi yang harus dilakukan oleh para pelaku transportasi untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

6. Lilik Wachid Budi Susilo, Transco (Transport Studies Community), komentar tertulis

Tujuan dari insentif/dukungan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa bisnis transportasi bisa bertahan, bukan berjalan dengan normal. Yang terpenting bagaimana setelah wabah BISNIS TRANSPORTASI DAPAT BERJALAN LAGI. Apa yang harus dilakukan: 1) pemerintah (kementerian teknsi) harus mampu mengidentifikasi kerugian dari masing masing perusahaan dengan komponen CAPEX, OPEX dan PAJAK perusahaan, 2) pemerintah/Kementerian Keuangan/Perbankan/OJK menindaklanjuti hasil perhitungan kerugian dari *oportunity loss* dari masing-masing perusahaan, dengan skema relaksasi pajak, strukturisasi pajak, penghapusan/pengurangan bunga, dll. Tentunya untuk menghitung *oportunity loss* perlu dilihat bahwa ada tiga tahap rentang waktu dampak wabah covid.

1. Mulai berlangsungnya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan jumlah penumpang dan dampak bagi kelangsungan hidup perusahaan angkutan umum operasional arma da masih jalan
2. Respon Kementerian Perhubungan atas keluarnya kebijakan Pemerintah untuk meredam penyebaran virus, yaitu dengan mengeluarkan prosedur covid-19 untuk melakukan phisycal distancing yang mengharuskan layanan angkutan umum mengurangi jumlah armada maupun membatasi jumlah penumpang yang boleh diangkut. --> operasional arm ada masih jalan tapi sudah ada aturan pembatasan jarak.
3. Keluarnya kebijakan pemerintah terkait PSBB dan larangan mudik yang berimplikasi pada pelarangan operasional transportasi umum yang menyebabkan operasional armada sudah berhenti total. Pemerintah HANYA bertanggungjawab pada *range* skala waktu pada poin 2 dan 3. Poin nomor 1 dapat “diabaikan” dengan asumsi bahwa hampir sebagian besar kegiatan ekonomi dan sosial di seluruh dunia termasuk Indonesia terdampak oleh pandemi covid-19 (dengan catatan operasional angkktan masih bisa berjalan).

Tapi *blissing in disguise* dari kasus pandemic Covid 19 ini adalah masyarakat sadar bahwa perusahaan angkutan umum harus legal, data harus transparan kepada pemerintah sehingga dapat digunakan untuk menghitung *oportunity loss-nya*.



Suara Operator

1. Ateng Aryono, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda)

- Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas pencerahan dan upaya yang telah dilakukan sangat luar biasa meskipun bantuan yang diberikan memang belum merata.
- Saat rapat dengan Kementerian Perhubungan pada pertengahan bulan Maret 2020 lalu, salah satu usulan yang disampaikan oleh DPP Organda adalah pemberian relaksasi kepada angkutan penumpang agar diperbolehkan mengangkut logistik kecil dan dengan skala B2B.
- Setelah mendengar beberapa skenario yang sudah dijelaskan oleh Pak Yustinus, kami menjadi memiliki harapan dan agak lebih tenang. Permasalahan mungkin ada di pendataan langsung. Ketika sudah menerima salah satu bantuan, apakah sudah dapat dipastikan tidak akan mendapat bantuan lain? Banyak teman di lapangan yang masih mengharapkan kepastian karena belum tersentuh dan menerima bantuan apapun. Bagaimana konektivitas antara bantuan yang satu dengan yang lain sehingga kami bisa memilah mana saja yang sudah dapat bantuan baik dari Pemerintah Daerah maupun dari pihak lain?

•

2. Nanda, DPC Organda Kota Surabaya

- Pada pertengahan bulan Maret lalu, kami sedikit demi sedikit mulai berhenti beroperasi. Sebelumnya, pendapatan angkutan umum perkotaan hanya mencapai Rp. 20.000,- per hari.
- Terkait dengan pernyataan dari Pak Ganis mengenai kontribusi kami selaku pelaku usaha transportasi, DPC Organda Kota Surabaya sudah membantu Pemerintah dengan pendataan secara menyeluruh agar dapat digunakan Pemerintah untuk eksekusi berbagai program bantuan itu.
- Jika berbicara mengenai keadilan tentang keamanan dari penyebaran wabah, maka kami berharap Pemerintah juga menghentikan operasional angkutan daring. Kami belum melihat keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani hal ini. Angkutan umum regular diminta stop operasi, tapi angkutan daring masih tetap operasional.

3. Andreas Lucky Lukwira (karyawan salah satu PO Bus), tanggapan tertulis

Dalam Permenhub No.25 tahun 2020 tidak diatur terkait apabila bus sudah terlanjur berada di daerah atau di Jakarta, nasib awalmua bagaimana? Seharusnya diatur pula terkait *positioning trip* (mengacu



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

positioning flight di Hubungan Udara) untuk bus dan awak angkutan (*crew*). Untuk moda pesawat di PM 25/2020 ada ruang pada klausul "penerbangan atas ijin Dirjen Hubud". Ijin bus dan *crew* melintas penting diatur karena terkait nasib mereka mengingat kemungkinan larangan operasional akan sangat panjang sehingga membiarkan manusia (*crew*) berada di luar wilayah PO-nya tanpa jaminan apa-apa tentu kurang manusiawi juga.

Muhammad Olga, iNews TV

- Pertanyaan ini ditujukan untuk Brigjen Chrysnanda, bagaimana pencegahan dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian dalam menyikapi angkutan *charter* dan operator nakal yang masih beroperasi dengan melalui jalan tikus yang masih sangat ramai untuk menghindari pengecekan dari jalan tol dan jalan arteri?

Tanggapan 2 Narasumber

Yustinus Prastowo, Staff Khusus Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi Strategis

- Terima kasih atas masukan yang sudah disampaikan dalam diskusi ini dan nantinya akan kami sampaikan kepada pimpinan agar bisa diperhatikan untuk dijadikan kebijakan yang cepat dan tepat.
- Kami akui bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memang belum sempurna dalam BLT ini. Masih ada beberapa yang belum menerima karena data selalu bergerak, maka dari itu marilah kita sama-sama saling membantu agar semua terpenuhi.
- Selain PKH yang memang sudah tidak ada kuota lagi tahun ini, bisa mengajukan bantuan lainnya kepada RT atau RW setempat. Bantuan yang paling mudah adalah dana desa yang bisa dikontrol bersama.
- Jika memang ada yang salah sasaran, butuh kesadaran dari si penerima agar tidak menerima yang bukan merupakan haknya dengan mengembalikan dan menyarankan untuk diberikan kepada siapa di sekitarnya yang lebih membutuhkan.
- Data yang dipakai Pemerintah sebenarnya sudah cukup akurat.

Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan

- Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ika, Ibu Tia, Ibu Ellen, dan teman-teman yang lain, akan segera direspon oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

Tanpa mendahului Pak Chrysnanda, menurut saya hal itu masih memungkinkan dilakukan oleh PO Bus, tetapi harus jelas bagaimana SOP-nya agar tidak ada benturan di lapangan dengan temen-temen yang selama ini memang bergerak di angkutan barang. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk memastikan teman-teman PO bisa tetap bertahan hidup pada kondisi seperti ini.

Brigadir Jenderal (Pol) Dr. Chrysnanda Dwilaksana, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri

- Pada kondisi seperti ini kita bisa belajar banyak, salah satunya adalah masukan mengenai sistem data patut menjadi pembelajaran bersama karena memang sangat penting. Kita perlu saling mendukung dan mencari solusi, bukan saling mencari kesalahan. Ketika kita tidak memiliki kepekaan, kepedulian, dan moralitas yang baik, maka kita mudah terprovokasi. Kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin karena memang sedang memerangi penyebaran wabah Covid-19 bersama-sama.
- Penyekatan ada yang dilakukan oleh Korlantas, ada yang dilakukan oleh Polda, tetapi Polres dan Polsek yang berada di ruang tertentu juga tetap akan bergerak. Masukan-masukan di diskusi ini tetap akan menjadi perhatian dan kami akan berkoordinasi untuk mencari solusinya.
- Mari kita tetap semangat, berpikir positif, hati gembira, selalu berdoa, dan ikuti anjuran Pemerintah.

Darmaningtyas, Moderator

- Terima kasih kepada para narasumber. Diskusi ini memang bukan diskusi untuk *brainstorming* saja tetapi kita berharap ada solusinya. Oleh sebab itu, beryukur sekali Pak Yustinus Prastowo berkenan hadir karena beliau turut merumuskan regulasi untuk penyelamatan angkutan umum.
- Sebetulnya kami sempat mengundang dari Kementerian Sosial untuk menjelaskan mengenai bantuan bagi angkutan umum, namun tidak bisa gabung Keterangan Mensos yang disampaikan melalui adalah “Kami hanya menjalankan program bansos yang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data tambahan dari Pemerintah Daerah. Kami tidak ada program bansos khusus untuk segmen atau komunitas tertentu.”
- Jadi berdasarkan keterangan Mensos tersebut, bagi awak angkutan umum, memang tidak mendapatkan bantuan khusus dari Kementerian Sosial, tetapi bisa pastikan berada dalam DTKS atau tidak. Inilah tugas baru bagi teman-teman Organda untuk membantu pengecekan data awak angkutan di lapangan.
- Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman operator mengenai kapan selesai, itu semua tergantung dari paradigma yang kita anut. Jika kita menganggap wabah Covid 19 ini sebagai siklus 100 tahunan sebagai upaya pemurnian bumi kembali, maka butuh waktu lama, paling cepat



INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Jl. Rawajati Barat V No. 33 RT.005/04
Pancoran Jakarta Selatan 12750
Telp/Fax: +62 21 79197057
www.instran.org; instranmail@gmail.com

sekitar satu tahun. Tetapi jika paradigma kita meyakini teori konspirasi, sehingga menganggap virus Corona ini sebagai senjata biologis, bagai dari perang dagang, mungkin bisa lebih cepat jika vaksinnya bisa ditemukan. Kita semua tidak tahu. Hal ini menjadi tugas bagi Pak Yustinus dalam merancang scenario jangka pendek (3 bulan), menengah (6 bulan), dan panjang (12 bulan). Mungkin teman-teman operator bisa membuat skenario yang sama.

- Pendapat saya agak berbeda dengan Pak Eko Ganis dari Universitas Brawijaya tadi, teman-teman operator saat ini bukan lagi berkontribusi, tetapi sudah berkorban demi kemaslahatan kita bersama dengan rela tidak beroperasi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus korona.

Terima kasih kepada para narasumber dan peserta diskusi yang sudah berkenan terlibat dalam diskusi ini.